



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 2701/Pdt.G/2021/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

xxxxxxxxxxxxx , umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

xxxxxxxxxxxxx , umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sekarang keberadaannya tidak diketahui alamatnya di sekitar wilayah RI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2701/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tanggal 18 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2005 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No : xxxxxxxxxxxx , tertanggal 15 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun di rumah kontrakan di daerah Sulawesi. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang

Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Halaman 1 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bernama xxxxxxxxxxxx (09-10-2016). Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak Bulan Desember 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020, dengan penyebab Termohon masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak lama setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit bahkan sejak saat itu Termohon mengganti nomor HP nya tanpa memberitahu Pemohon, dan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya di sekitar wilayah RI, yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya;
6. Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada keluarga Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Termohon dan Pemohon juga tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;
9. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon ( xxxxxxxxxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( xxxxxxxxxxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2021/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 16-11-2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Wonosobo Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 15 November 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Padureso Kabupaten kebumen Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 17-11-2021, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

### B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen; di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya sebagai Paman Pemohon;

Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2021/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2021;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dirumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saya tahu karena Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Penyebabnya perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi yang kurang, kemudian sejak tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak diketahui alamatnya selama 1 tahun;
- Bahwa Selama pergi Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen; di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2021;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dirumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saya tahu karena Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Penyebabnya perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi yang kurang, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Selama pergi kurang lebih 1 tahun Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2021/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx , tanggal 15 November 2021 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon akan tetapi sampai saat ini tidak kembali, tidak memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Indonesia dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang

Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2021/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 10 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PA.Kbm Tahun 2021. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun bersama di rumah kontrakan di Sulawesi kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 9 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Termohon, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah penduduk

Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2021/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kabupaten Kebumen. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya yang membuktikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun bersama di rumah kontrakan di Sulawesi kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2021/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 9 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di Wilayah Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keadaan tersebut di atas, sedangkan usaha perdamaian telah dilakukan Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, oleh karena itu memaksakan kepada kedua belah pihak untuk tetap terikat dalam suatu perkawinan sedangkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud akan berakibat membawa madlorot bagi kedua belah pihak, oleh karena itu madlorot tersebut harus dihindarkan sesuai hadits Nabi yang artinya : "Tidak boleh membuat bahaya (terhadap diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain)" (H.R. Ibnu Majah) demikian pula kaidah hukum menyebutkan *يزال الضرر* yang artinya: "Kemadlorotan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi dan maha mengetahui."

Dan Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2021/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 10 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan cerai talak Pemohon yang beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( xxxxxxxxxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( xxxxxxxxxxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Selasa** tanggal **05 April 2022 M** bertepatan dengan tanggal **3 Ramadhan 1443 H** oleh Drs. Romelan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kharis dan Drs. A. Muhtarom masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2021/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua  
ttd  
Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. Kharis

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. A. Muhtarom

Panitera Pengganti  
Ttd  
Dra. Hj. Mardiyah Hayati

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	425.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Muhammad Salafudin, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak  
tanggal \_\_\_\_\_

Putusan Nomor 2701/Pdt.G/2021/PA.Kbm  
Halaman 10 dari 10 halaman